

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
BELANJA LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD INDRA PRATAMA
NIM. 150604055**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Indra Pratama

NIM : 150604055

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 September 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Indra Pratama

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi**

Dengan Judul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh :

**Muhammad Indra Pratama
NIM. 150604055**

**Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada program studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,



**Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009**

Pembimbing II,



**Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301**

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



**Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 197204281999031005**

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Muhammad Indra Pratama

NIM. 150604055

Dengan Judul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 September 2019
24 Muharram 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris

Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301

Penguji I,

Marwiyati, SE., MM
NIP. 197404172005012002

Penguji II,

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Fuad, M.Ag.
NIP. 19640314 1992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Indra Pratama
NIM : 150604055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : pratama.indra.pi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 September 2019

Penulis


Muhammad Indra Pratama
NIM. 150604055

Mengetahui,
Pembimbing I


Dr. Haras Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II


Tajul Ula, SE., M.Si
NIDN. 1308129301

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”.

Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Marwiyati, SE., MM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, PH. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.

4. Dr. Hafas Furqani. M.Ec. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Tajul Ula, SE., M.Si. sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Marwiyati. SE., MM. sebagai Dosen Penguji 1 dan Rachmi Meutia, M.Sc. Sebagai Dosen Penguji 2.
6. Fithriyadi, Lc., MA Sebagai Pembimbing Akademik (PA) terimakasih atas bimbingannya selama ini.
7. Kepada Bunda dan Adik tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan doa serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 24 September 2019
Penulis,

Muhammad Indra Pratama

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Indra Pratama
NIM : 150604055
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Tebal Skripsi : 117 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani. M.Ec
Pembimbing II : Tajul Ula, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 2) pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi aceh periode tahun 2013 - 2017. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel. Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil yang di dapatkan pemerintah kabupaten/kota di provinsi aceh harus lebih mandiri dalam urusan keuangan daerahnya agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

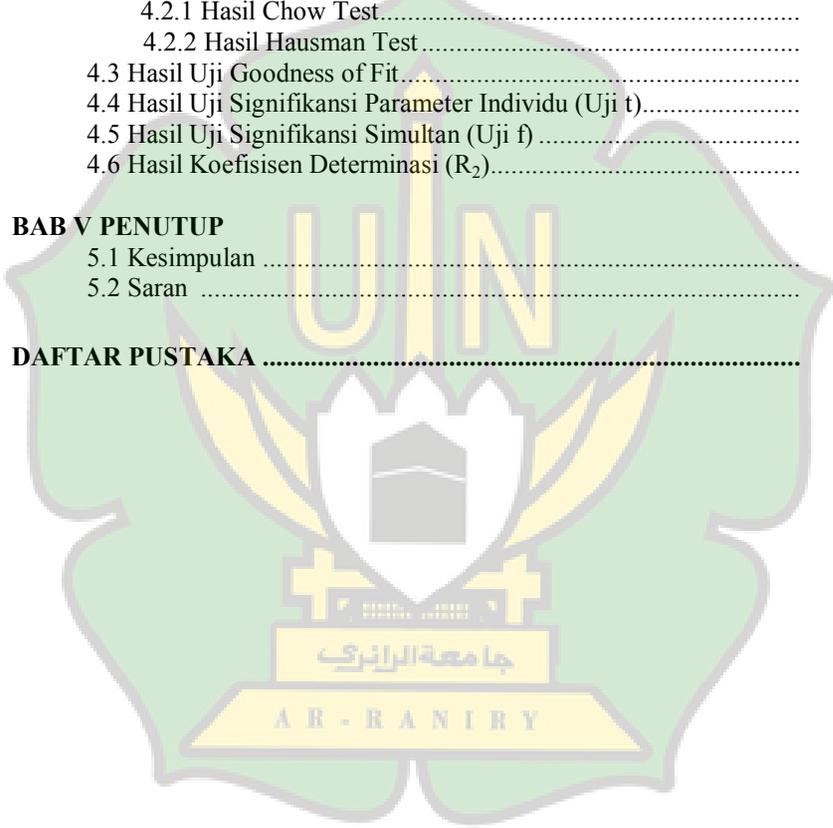
Kata Kunci: Pajak, Retribusi, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR RUMUS	xx
DAFTAR DIAGRAM	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.2 Pajak	14
2.2.1 Fungsi Pajak	14
2.3 Pajak Daerah	15
2.3.1 Prinsip-prinsip Pajak Daerah	16
2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah	18
2.3.3 Tarif Pajak Daerah	19
2.4 Retribusi Daerah	20
2.4.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah	21
2.4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah	21
2.4.3 Tarif Retribusi Daerah	24
2.4.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi	25
2.5 Belanja Daerah	26
2.5.1 Pengeluaran dalam Belanja Daerah	27
2.6 Belanja Langsung	27

2.6.1 Jenis Belanja Langsung	29
2.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	32
2.7.1 PDRB terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	33
2.7.2 Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	34
2.7.3 Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2.7.4 Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	36
2.8 Penelitian Sebelumnya.....	37
2.9 Kerangka Pemikiran	41
2.10 Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Populasi dan Sampel.....	46
3.6 Variabel Penelitian.....	46
3.6.1 Variabel Terikat (Dependen)	46
3.6.2 Variabel Bebas (Independen).....	47
3.7 Definisi Operasional	47
3.8 Metode Analisis Data.....	48
3.8.1 Analisis Regresi Data Panel.....	48
3.8.2 Model Estimasi Regresi Data Panel	50
3.8.3 Uji Goodness of Fit	54
3.9 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	55
3.10 Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	55
3.11 Koefisien Determinasi (R_2).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	57
4.1.2 Kabupaten Simeulue	59
4.1.3 Kabupaten Aceh Singkil	60
4.1.4 Kabupaten Aceh Selatan	61
4.1.5 Kabupaten Aceh Tenggara	62
4.1.6 Kabupaten Aceh Timur.....	64
4.1.7 Kabupaten Aceh Tengah.....	65
4.1.8 Kabupaten Aceh Barat	66
4.1.9 Kabupaten Pidie.....	67
4.1.10 Kabupaten Bireun.....	68
4.1.11 Kabupaten Aceh Utara.....	69
4.1.12 Kabupaten Aceh Barat Daya	70
4.1.13 Kabupaten Gayo Lues.....	71
4.1.14 Kabupaten Aceh Tamiang.....	72
4.1.15 Kabupaten Nagan Raya.....	73

4.1.16 Kabupaten Aceh Jaya.....	74
4.1.17 Kabupaten Bener Meriah	75
4.1.18 Kabupaten Pidie Jaya	76
4.1.19 Kota Banda Aceh.....	77
4.1.20 Kota Sabang	78
4.1.21 Kota Langsa.....	79
4.1.22 Kota Lhokseumawe	80
4.1.23 Kota Subulussalam	81
4.2 Estimasi Regresi Data Panel	82
4.2.1 Hasil Chow Test.....	83
4.2.2 Hasil Hausman Test.....	84
4.3 Hasil Uji Goodness of Fit.....	85
4.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	87
4.5 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	88
4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R_2).....	88
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Provinsi Aceh Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	6
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	58
Tabel 4.2	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Simeulue Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	60
Tabel 4.3	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	61
Tabel 4.4	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Selatan Periode Tahun 2013 s/d 2017 (JutaRupiah).....	62
Tabel 4.5	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	63
Tabel 4.6	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Timur Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	64
Tabel 4.7	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tengah Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	65
Tabel 4.8	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	66
Tabel 4.9	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Pidie Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	67
Tabel4.10	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Bireun Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	68
Tabel4.11	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	69
Tabel 4.12	PDRB (ADHK) Pajak Daerah,Retribusi Daerah,dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	70
Tabel 4.13	PDRB (ADHK) Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Gayo Lues Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah).....	71

Tabel 4.14	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	73
Tabel 4.15	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	74
Tabel 4.16	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Jaya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	75
Tabel 4.17	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	76
Tabel 4.18	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Pidie Jaya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	77
Tabel 4.19	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Banda Aceh Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	78
Tabel 4.20	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Sabang Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	79
Tabel 4.21	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Langsa Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	80
Tabel 4.22	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	81
Tabel 4.23	PDRB (ADHK) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Subulussalam Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	82
Tabel 4.24	Hasil Uji Chow	83
Tabel 4.25	Hasil Uji Hausman	85
Tabel 4.26	Fixed Effect Model	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Peta Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.....	57



DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Regional Domestik Bruto
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBA	: Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
DJP	: Direktorat Jendral Pajak
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Ln	: Logaritma Natural
CEM	: Common Effect Model
FEM	: Fixed Effect Model
REM	: Random Effect Model



DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Persamaan Regresi Data Panel	49
Rumus 3.2 Persamaan Regresi Data Panel Dengan ln	49
Rumus 3.3 Persamaan <i>Common Effect Model</i> dengan ln	51
Rumus 3.4 Persamaan <i>Fixed Effect Model</i> dengan ln	52
Rumus 3.5 Persamaan <i>Random Effect Model</i> dengan ln	53



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Aceh
Tahun 2013 – 2017 (juta rupiah).....

3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)	97
Lampiran 2 Data ln PDRB (ADHK), ln Pajak Daerah, ln Retribusi Daerah, dan ln Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Periode Tahun 2013 s/d 2017 (persen)	104
Lampiran 3 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	111
Lampiran 4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	112
Lampiran 5 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>	113
Lampiran 6 Hasil Uji <i>Chow</i>	114
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	115
Biodata	117



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara luas yang terbagi atas beberapa provinsi dan terpisah antar pulau-pulau, setiap provinsi di Indonesia terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerahnya masing-masing. Tujuan dibentuknya pemerintah daerah di setiap wilayah Indonesia agar pemerintah pusat lebih mudah mengkoordinasi pemerintah-pemerintah yang ada di setiap provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa-desa atau perkampungan. Agar dapat memudahkan penataan dan pelayanan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasaskan sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

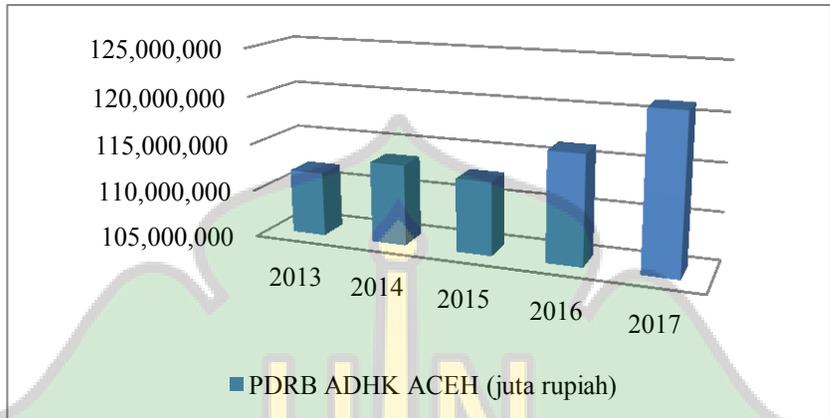
Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal di tingkat daerah memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif.

Menurut Mauri, Mattalatta & Hasmin, (2017) salah satu cara untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah dengan kemampuan *self-supporting* (keswadayaan) dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor mendasar dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang, keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera Indonesia yang diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh merupakan provinsi yang mempunyai *record* cukup baik dalam hal pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi Aceh dapat diproksikan ke dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun (Mononimbar, Walewangko dan Sumual, 2017). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah diagram pertumbuhan ekonomi Aceh yang diukur dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode tahun 2013 s/d 2017:

Diagram 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Aceh
Tahun 2013 - 2017 (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari diagram diatas dapat dilihat proksi pertumbuhan ekonomi Aceh melalui PDRB (ADHK) mengalami peningkatan sebesar 1,55% dari tahun 2013 – 2014, akan tetapi pada tahun 2014 - 2015 PDRB Aceh mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar - 0,72%. Kemudian pada tahun selanjutnya PDRB Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 – 2016 sebesar 3,3% dan tahun 2016 – 2017 sebesar 4.19% persen. Namun, pertumbuhan ekonomi Aceh belum mampu bersaing lebih baik di tingkat sumatera apalagi nasional. Dalam alokasi dana APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh), Aceh memang lebih besar dari Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi soal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat bumi Serambi Mekah ini belum menempatkan dirinya pada posisi terbaik di tingkat Pulau

Sumatera. Apalagi dalam skala nasional, Aceh selalu dibawah lima persen tingkat pertumbuhan ekonominya.

Menurut Hasan dalam Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, baik itu sektor pendapatan suatu daerah atau pengeluaran suatu daerah.

Sumber-sumber pendapatan suatu daerah digolongkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu cerminan kemandirian suatu daerah dalam hal keuangan (*financial*), kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan menggambarkan kondisi seberapa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah begitu pula sebaliknya. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Pajak daerah adalah salah satu komponen PAD memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah (Rochimah, Raharjo, & Oemar, 2013). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga harus dikelola secara professional dan transparan. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah.

Penerimaan anggaran daerah dari PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui belanja langsung dalam APBD. Belanja langsung adalah sisihan dari APBD yang dapat terlihat kemana APBD tersalurkan. Belanja langsung oleh pemerintah daerah dapat terlihat karena dana yang di anggarkan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang pada umumnya dibagi menjadi tiga yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut adalah tabel PAD, pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung di provinsi Aceh periode tahun 2013 s/d 2017:

Tabel 1.1
PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung
Provinsi Aceh Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

NO	Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,325,435.00	752,846.75	6,346.06	1,650,120.55
2	2014	1,731,130.84	1,030,679.18	3,701.22	2,407,479.41
3	2015	1,972,049.03	1,172,685.14	4,799.51	5,056,790.01
4	2016	2,057,481.53	1,219,985.56	11,802.50	6,830,030.93
5	2017	2,276,305.56	1,315,393.89	8,050.85	5,570,624.29

Sumber: DJP dan Kemenkeu Indonesia diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sangat besar, semakin besar PAD maka belanja daerah juga semakin besar, jika PAD rendah maka belanja daerah juga akan rendah. Menurut Sharma dalam Juwari, Setyadi dan ulfah (2016) faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektifitas penggunaan belanja modal di proses pembangunan. Pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Maka dari itu arah penelitian ini merujuk kepada pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penerima anggaran, serta belanja langsung sebagai pengeluaran anggaran yang diharapkan

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan DAU yang berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah Kalimantan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, Walelongko dan Sumual (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil regresi kedua menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil judul penelitian ini sebagai **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”** yang akan diteliti pada periode tahun 2013 s/d 2017.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh beberapa pihak diantaranya adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan pemikiran dalam upaya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selain itu juga penelitian ini merupakan awal saya untuk memasuki dunia kerja. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan kepada pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan digunakan sebagai bahan perbandingan.

c. Bagi Intansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Aceh khususnya kepada pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota provinsi Aceh dalam hal pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. **Manfaat Kebijakan**

Agar pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh dapat melihat dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung yang diharapkan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam lima dengan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan rumusan masalahnya, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasannya.
- BAB II Landasan teori yang didalamnya menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian atau temuan penelitian terkait, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.
- BAB III Metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan serta menguji hipotesis. Di dalam juga menjelaskan jenis penelitian, teknik memperolehnya, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek dari penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari analisis objek penelitian yang ada.

BAB V Penutup, yang menjelaskan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian, beserta saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Menurut Kaho (2005) untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang memadai dengan sendirinya, dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni:

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat;
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut;
4. Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;
5. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Dalam hubungannya dengan keuangan daerah ini maka ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya adalah bagian

XIII paragraf 1, pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumber pendapatan daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri, yang terdiri dari:
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan Daerah;
 4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah;
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 1. Sumbangan dari Pemerintah;
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari ketentuan tersebut tersebut di atas maka Pendapatan Daerah dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan non-Asli Daerah.

Menurut Rachim dalam Mubarak (2016) PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi PAD yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa PAD adalah segala penerimaan

daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi dalam Paramita (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten.

Menurut Kaho (2005:80) ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat di ikhtisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pembangunan daerah atau

untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.3.1 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Menurut Devas dalam Mahmudi (2010) prinsip pajak daerah tersebut adalah:

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil dalam berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang baik dan meningkat untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam system administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.

4. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

5. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Akan tetapi jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan

yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tahan
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah di atas. Jenis pajak provinsi, kabupaten, dan kota diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.3.3 Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

1. Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen)
2. Tarif BBNKB&KAA ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen)
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)

7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
10. Tarif pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen)

2.4 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara (Siahaan, 2016). Menurut (Kaho, 2005:75) ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh negara;
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 6 bahwa penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah atau kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:129) beberapa ciri melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintahan atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.4.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah (Siahaan, 2016). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas 3 golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penggabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Persangrahan/Villa
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyeberangan di Air
 11. Retribusi Penjualan Prroduksi Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatn ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.3 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Misalnya pembedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2016).

Tarif retribusi dilihat kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan mengendalikan permintaan layanan tersebut, kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi. Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2016).

2.4.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Menurut Siahaan (2016) perbedaan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Kontra prestasinya, pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah, hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Pada retribusi balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

- c. Sifat pemungutannya, pajak bersifat umum artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaannya, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan dari retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e. Lembaga atau badan pemungutnya, pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan,

akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Menurut Mahmudi (2010) istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja disektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja pada organisasi sektor publik ini menjadi ciri khas tersendiri yang menunjukkan keunikan sektor publik dibandingkan sektor bisnis karena belanja disektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum digunakan di sektor bisnis.

2.5.1 Pengeluaran Dalam Belanja Daerah

Pengeluaran merupakan salah satu unsur pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi pengeluaran pembiayaan dapat berupa: 1) pembentukan dana cadangan, 2) penyertaan modal misalnya penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 3) pembelian surat berharga seperti Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah daerah, 4) pelunasan utang, dan 5) pemberian pinjaman (Mahmudi, 2010)

2.6 Belanja Langsung

Menurut pemendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam bentuk upaya yang berjumlah satu atau lebih jenis kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Menurut Maga, Tolosang & Lopian (2016) kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagian masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Secara singkat biaya langsung merupakan biaya yang langsung terkait dengan kegiatan. Artinya, suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Menurut (Mahmudi, 2010) biaya langsung meliputi:

1. Belanja Tenaga Kerja/Pegawai Langsung

Yaitu tenaga kerja/pegawai (personil) yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Belanja tenaga kerja langsung ini perilaku biayanya bersifat variabel, yakni jumlahnya berfluktuasi mengikuti volume kegiatan. Termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah: 1) honorarium dan upah, 2) lembur, dan 3) biaya personil lainnya, misalnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Manajer Keuangan Publik bertanggung jawab untuk

menentukan tarif honorarium dan upah yang wajar, tarif lembur, serta biaya yang terkait dengan tenaga kerja langsung lainnya yang nanti dituangkan dalam standar tarif tenaga kerja langsung.

2. Belanja Barang dan Jasa

Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Biaya barang dan jasa ini meliputi : 1) biaya alat tulis kantor, 2) biaya bahan/material, 3) biaya sewa gedung, kendaraan dan peralatan 4) biaya perjalanan, 5) biaya cetak dan penggandaan, 6) biaya kontrak hukum (notaris).

3. Belanja Modal

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, *furniture*, *software*, dan sebagainya.

2.6.1 Jenis Belanja Langsung

Menurut Mahmudi (2010) belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung juga dirinci menjadi jenis, objek dan rincian objek belanja. Jenis belanja langsung meliputi:

- a. Belanja Pegawai, dengan objek belanja meliputi:
 1. Honorarium PNS
 2. Honorarium Non-PNS

3. Uang Lembur
 4. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS.
- b. Belanja Barang dan Jasa, dengan objek belanja antara lain:
1. Belanja Bahan Pakai Habis
 2. Belanja Bahan/Material
 3. Belanja Jasa Kantor
 4. Belanja Premi Asuransi
 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 6. Belanja Cetak dan Penggandaan
 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 9. Belanja Sewa Alat Berat
 10. Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan Kantor
 11. Belanja Makanan dan Minuman
 12. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut
 13. Belanja Pakaian Kerja
 14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
 15. Belanja Perjalanan Dinas
 16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas
 17. Belanja Pemulangan Pegawai
- c. Belanja Modal, dengan objek belanja antara lain:
1. Belanja Modal Pengadaan Tanah

2. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
3. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
4. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat di Air Bermotor
6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat di Air Tidak Bermotor
7. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
8. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
9. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat pengolahan Pertanian dan Peternakan
10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
12. Belanja Modal Pengadaan Komputer
13. Belanja Modal Pengadaan Mebel
14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

22. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan
23. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
29. Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman
30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

2.7 **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah tolak ukur perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan juga merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa *rill* terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada

tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat (Mononimbar, Walewangko & Sumual, 2017).

Menurut Hasan dalam Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PDRB dalam ADHK karena PDRB harga konstan dapat melihat perbandingan dari tahun-tahun perkembangan PDRB yang dalam penelitian ini dari tahun 2013 s/d 2017. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini didasari karena semakin tinggi belanja pemerintah maka PDRB juga akan meningkat setiap tahunnya.

2.7.1 PDRB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Penyusunan PDRB dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Dalam penelitian ini untuk melihat proksi pertumbuhan ekonomi dari PDRB hanya dilakukan pada dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan yang dapat dilihat dari

pajak daerah dan retribusi daerah dan pendekatan pengeluaran yang dapat dilihat dari belanja langsung. Menurut Dewi, J.K., Budhi, dalam Widyaningsih (2018) pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB berdasarkan harga konstan, supaya angka pertumbuhan yang dihasilkan ada pertambahan produksi.

Pada pendekatan pendapatan yang dilihat dari pajak daerah dan retribusi daerah, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. Pendekatan pengeluaran yang dilihat dari belanja langsung digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor (Widyaningsih, 2018).

Secara umum perkembangan PDRB dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Proses kenaikan output per kapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah

seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah (Rarung, 2016).

2.7.2 Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mardiasmo dalam Hidayat dan Nalle (2017) pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan dari PAD yang dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha didalam atau diluar pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi dari sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah. Secara umum meningkatnya usaha-usaha di suatu daerah seperti Hotel, Restoran, Hiburan dan lain-lain dapat memberikan dampak positif di daerah tersebut, selain penerimaan pemerintah daerah yang bersumber salah satunya dari pajak daerah mengalami peningkatan, pendapatan masyarakat juga meningkat. Daya beli masyarakat akan semakin tinggi dan perputaran uang di daerah juga bertambah tinggi. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan (Sunarto & Sunyoto, 2016).

2.7.3 Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Marihot P. Siahaan dalam Mononimbar, Walengko & Sumual (2017) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Menurut Ahmad Yani dalam Mononimbar, Walengko & Sumual (2017) daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus karena terdapat ciri-ciri atau syarat-syarat tertentu dalam retribusi. Menurut Sunarto dan Sunyoto (2016) pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. Sebagai umpan baliknya, pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh daerah guna memajukan roda perekonomian seperti pembangunan prasarana di daerah. Fasilitas prasarana yang baik mendorong investor untuk meningkatkan usaha di daerah. Fasilitas prasarana tidak hanya berbentuk perbaikan jalan, dan fasilitas umum lainnya. Tetapi keamanan di daerah menjadi faktor pendorong berkembangnya usaha. Jika usaha di daerah

berkembang, akan banyak menyerap tenaga kerja di daerah. Hal ini berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perputaran Uang yang beredar di daerah semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

2.7.4 Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mankiw (2006) perubahan-perubahan dalam belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Salah satu fungsi belanja pemerintah adalah sebagai salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Dalam teori perpotongan *Keynesian* menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, teori tersebut disebut penggandaan belanja pemerintah (*government-purchases multiplier*). Dalam teori ini menjelaskan bahwa seberapa besar pendapatan meingkat dalam menanggapi kenaikan misalnya \$1 dalam belanja pemerintah. Menurut teori *Keynesian* kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda karena (*multiplier effect*) terhadap pendapatan karena menurut fungsi konsumsi $C = C(Y - T)$, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. Karena itu, dalam hal ini kenaikan belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

2.8 Penelitian Sebelumnya

Hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan hasil dari perbedaan dengan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan” menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel pajak dan retribusi serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di wilayah interregional Kalimantan periode 2013-2014 memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis jalur substruktur kedua menemukan adanya pengaruh langsung yang signifikan variabel belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara Simultan, ada pengaruh signifikan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Sunyoto (2016) dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah” menunjukkan bahwa kemandirian daerah, restribusi daerah dan pajak daerah dapat menjelaskan 46,2% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, selebihnya 53,8% dijelaskan variabel lain di luar model.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, Walelongko dan Sumual (2017) dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan” menunjukkan bahwa Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 61%. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah sebagai variable bebas dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variable terikat adalah sangat erat dan bersifat positif. Nilai koefisien determinasi sebesar 38.1%. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 38.1% mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable Pajak Daerah bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 38%, sedangkan sisanya 62% disumbangkan oleh variable lain.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Budhi (2018) dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah” menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Rarung (2016) dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengaruh PAD dan DAU Terhadap

PDRB di Kota Manado” menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengaruh PAD dan DAU memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan PDRB ADHK di Kota Manado. Besarnya pengaruh PAD yang terealisasi di kota Manado ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 33.1%.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah:

1. Persamaan Penelitian

Sama-sama meneliti tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Suatu Daerah.

2. Perbedaan Penelitian

- a. Penelitian Juwari, Setyadi dan Ulfah (2016) meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK dan DAU terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- b. Penelitian Sunarto dan Sunyoto (2016) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi

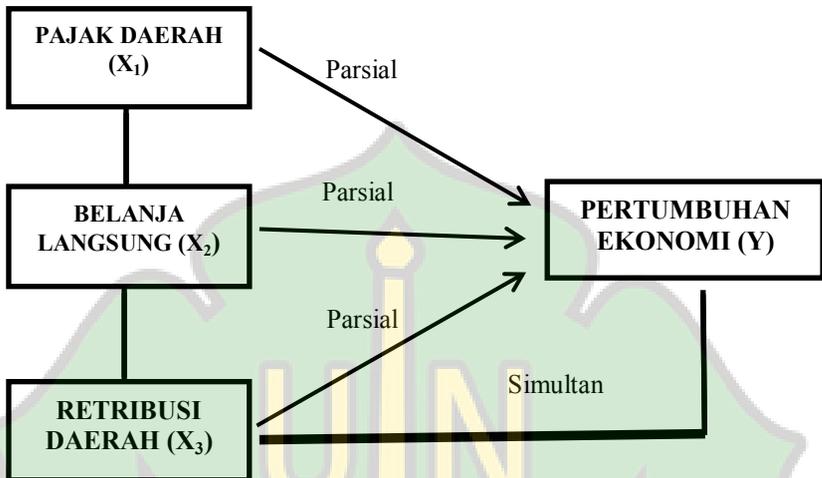
Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- c. Penelitian Mononimbar, Walelongko dan Sumual (2017) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- d. Penelitian Dewi & Budhi (2018) Meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- e. Rarung (2016) meneliti tentang Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah seluruh kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk memudahkan arah didalam penelitian. Kerangka pemikiran

dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Penelitian ini akan menganalisis secara parsial dari pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis secara simultan dari pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau kesimpulan sementara dalam penelitian atau dengan kata lain hipotesis

merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori, dan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H_{a1} : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{o1} : Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{a2} : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{o2} : Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{a3} : Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

H_{o3} : Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (*quantitative research*) yang bersifat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan antara pajak daerah, retribusi daerah dan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Sugiyono (2009), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki dua variabel penelitian, yaitu: (1) variabel independen, dan (2) variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Dewi & Budhi, 2018).

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi dan ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di provinsi Aceh. Data sekunder tentang pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung dalam APBD kabupaten/kota di provinsi Aceh diperoleh dari Dirjen Pajak & Kemenkeu Indonesia serta data pertumbuhan ekonomi atas dasar

harga konstan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh periode tahun 2013 – 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber di luar organisasi, di antaranya publikasi pemerintah, buku dan majalah. Dalam hal ini data diperoleh dari Dirjen Pajak & Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Aceh yang berdasarkan atas harga konstan 2013 pada tahun 2017 dalam satuan juta rupiah, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- b. Data realisasi pajak daerah tahun 2013-2017 provinsi Aceh dalam satuan juta rupiah, yang bersumber dari Dirjen Pajak dan Kemenkeu RI.
- c. Data realisasi retribusi daerah tahun 2013-2017 provinsi Aceh dalam satuan juta rupiah, yang bersumber dari Dirjen Pajak dan Kemenkeu RI.
- d. Data realisasi belanja langsung provinsi Aceh tahun 2013 - 2017 dalam satuan juta rupiah yang bersumber dari Dirjen Pajak dan Kemenkeu RI..

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan serta wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, yaitu populasi dari pajak daerah, retribusi daerah, belanja langsung dan PDRB. Sampel dalam penelitian ini menggunakan data panel, yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*, data *cross section* pada penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di provinsi aceh dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2013 s/d 2017 (lima periode tahun terakhir).

3.6 Variabel Penelitian

3.6.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

3.6.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung.

3.7 Definisi Operasional

Berdasarkan hasil identifikasi variabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk keperluan daerah dan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah dalam penelitian ini dihitung dalam satuan rupiah/tahun, periode tahun yang akan diteliti adalah tahun 2013 – 2017 pada setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah atau kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dalam penelitian ini dihitung dalam satuan rupiah/tahun, periode tahun yang akan diteliti adalah tahun 2013 – 2017 pada setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.

3. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program, biaya langsung meliputi belanja tenaga kerja/pegawai langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung dalam penelitian ini dihitung dalam satuan rupiah/tahun, periode tahun yang akan diteliti adalah tahun 2013 – 2017 pada setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.
4. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDBR ADHK, karena PDRB harga konstan dapat melihat perbandingan dari tahun-tahun perkembangan PDRB. PDRB dalam penelitian ini dihitung dalam satuan rupiah/tahun, periode tahun yang akan diteliti adalah tahun 2013 – 2017 pada setiap kabupaten/kota di provinsi Aceh.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel

Data-data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data seksi silang (*cross section*) dan data rentan waktu (*time series*). Oleh karena itu, persamaan data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \quad (3.1)$$

$t = 1, 2, \dots, T$; dan $i = 1, 2, \dots, N$

Keterangan :

T : Banyaknya waktu

N : Banyaknya observasi

$N \times T$: Banyaknya data panel

Y_{it} : Variabel terikat individu ke i periode ke t

α : konstanta

β : koefisien regresi

X_{it} : variabel bebas individu ke i periode ke t

e_{it} : error term

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), belanja langsung (X_3) terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y) serta untuk mengetahui seberapa besar dan arah hubungan digunakan analisis regresi data panel dengan metode *General Least Square* (GLS), yang hubungan fungsinya dinyatakan dalam regresi data panel dengan menggunakan \ln (logaritma natural) pada persamaan berikut :

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan :

Y : Variabel terikat (variabel dependen)

\ln : logaritma natural

β	: beta
α	: konstanta
it	: variabel individu ke i dan periode ke t
X_1	: Variabel bebas 1 (variabel independen 1)
X_2	: Variabel bebas 2 (variabel independen 2)
X_3	: Variabel bebas 3 (variabel independen 3)
e_{it}	: error term

3.8.2 Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi, yakni *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM) (Hidayat dan Nalle, 2017).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini dikenal dengan *estimasi commont effect* yaitu teknik estimasi paling sederhana hanya mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Didalam pendekatan ini, unit *time series* dan *cross section* diperlakukan lalu diregresikan menggunakan metode *Ordinay Least Square* (OLS) untuk mengestimasi data panel. Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tidak melihat tiap objek yang saling berbeda, bahkan satu objek pada satu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Menurut Widarjono dalam Latuconsina (2017) mengatakan bahwa model CEM α konstan atau

sama di setiap individu maupun setiap periode. CEM dinyatakan dalam persamaan dengan menggunakan \ln (logaritma natural) sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BL_{it} + e_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (proksi pertumbuhan ekonomi)

\ln : logaritma natural

β : beta

α : konstanta

it : variabel individu ke i dan periode ke t

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

BL : Belanja Langsung

e : error term

2. Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan *fixed effect* di sini maksudnya adalah satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Pada metode fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan

perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasikan data. Menurut Hsiao dalam Latuconsina (2017) FEM disini mengasumsikan bahwa tidak ada *time spesific effects* dan hanya memfokuskan pada *individual spesific effects* yang dituliskan pada persamaan dengan menggunakan *ln* (logaritma natural) sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BL_{it} + e_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (proksi pertumbuhan ekonomi)

ln : logaritma natural

β : beta

α : konstanta

it : variabel individu ke *i* dan periode ke *t*

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

BL : Belanja Langsung

e : error term

Indeks *i* pada intersep (α_i) menunjukkan bahwa intersep dari masing-masing individu berbeda, namun intersep dari masing-masing untuk unit *time series* tetap (konstan).

3. Random Effect Model (REM)

Random Effect digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel

semu, metode efek random menggunakan residual, yang di duga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Model ini akan mengestimasi data panel, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing daerah. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS). Dalam REM juga memperhitungkan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section* sehingga dapat dituliskan dalam persamaan dengan menggunakan *ln* (logaritma natural) sebagai berikut :

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \ln PD_{it} + \beta_2 \ln RD_{it} + \beta_3 \ln BL_{it} + e_{it} \quad (3.5)$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (proksi pertumbuhan ekonomi)

ln : logaritma natural

β : beta

α : konstanta

it : variabel individu ke i dan periode ke t

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

BL : Belanja Langsung

e : error term

Dengan asumsi α_{it} adalah variabel *random* dari setiap unit intersep.

3.8.3 Uji *Goodness of Fit*

Menurut Hidayat dan Nalle (2017) untuk menentukan model yang tepat dalam analisis regresi data panel, digunakan uji *Goodnes of Fit* yaitu dengan melakukan *Chow test* dan *Hausman test* dengan kriteria sebagai berikut:

a. *Chow Test*

Uji ini digunakan menentukan pilihan antara metode CEM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : Metode yang dipilih *Common Effect Model* (CEM) H_1 : Metode yang dipilih *Fixed Effect Model* (FEM). Dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 0.05 (5 persen) maka model yang digunakan dalam uji ini adalah fixed effect (Hidayat dan Nalle, 2017). Namun apabila p-value lebih dari 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah common effect.

b. *Hausman Test*

Uji ini digunakan menentukan pilihan antara metode REM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis: H_0 : Metode yang dipilih *Random Effect Model* (REM) H_1 : Metode yang dipilih *Fixed Effect Model* (FEM). Dasar penolakan H_0 dengan menggunakan pertimbangan probabilitas dari *cross-section random*. Jika probabilita dari *cross-section random* < 0.05 (5 persen) maka model yang digunakan adalah fixed effect (Hidayat dan Nalle, 2017). Namun apabila *cross-section random* > 0.05 maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect.

3.9 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai probabilitas di setiap variabel lebih kecil dari konstanta (prob. < 0.05). Untuk mengetahui hasil dari uji t, digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambil keputusan :

1. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.10 Uji signifikansi Simultan (Uji f)

Dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serentak. Untuk mengetahui hasil dari uji f, digunakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : Semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Jika nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.11 Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Menurut Kuncoro dalam Mukarramah (2017) nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu nilai R_2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh



Sumber : Dinas Kesehatan Aceh (2016)

Gambar 4.1
Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kabupaten/kota di provinsi Aceh terdiri dari Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2018) jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah 5.495.798 jiwa, berikut adalah tabel jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	SIMEULUE	89.327
2	ACEH SINGKIL	129.963
3	ACEH SELATAN	230.254
4	ACEH TENGGARA	221.684
5	ACEH TIMUR	422.261
6	ACEH TENGAH	208.407
7	ACEH BARAT	189.119
8	ACEH BESAR	400.913
9	PIDIE	437.740
10	BIREUEN	432.870
11	ACEH UTARA	902.554
12	ACEH BARAT DAYA	148.687
13	GAYO LUES	95.370
14	ACEH TAMIANG	287.733
15	NAGAN RAYA	167.672
16	ACEH JAYA	86.058
17	BENER MERIAH	154.509
18	PIDIE JAYA	157.588
19	BANDA ACEH	238.814
20	SABANG	40.040
21	LANGSA	182.424

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
22	LHOKSEUMAWE	190.624
23	SUBULUSSALAM	81.187
JUMLAH		5.495.798

Sumber : BPS Provinsi Aceh (2018)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang relative banyak akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan mereka membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti membayar pajak hiburan, pajak restoran, retribusi parkir, dll.

4.1.2 Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten simeulue adalah 2.051,48 km², jumlah penduduk pada kabupaten simeulue sebanyak 89.327 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 43 jiwa/km². Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Perekonomian Kabupaten Simeulue dominan berasal dari peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan minyak bumi. Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Simeulue periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.2
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja
Langsung Kabupaten Simeulue Periode Tahun 2013 s/d 2017
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,236,000.00	3,135.00	6,634.00	238,325.00
2	2014	1,289,000.00	3,167.00	1,272.00	139,159.00
3	2015	1,345,000.00	3,732.47	1,882.40	327,271.72
4	2016	1,406,000.00	2,512.00	2,039.73	435,555.51
5	2017	1,467,000.00	9,130.84	1,918.15	515,028.30

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Simeulue periode tahun 2013 s/d 2017. Pada Kabupaten Simeulue sumber perekonomian daerahnya berasal dari peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan minyak bumi.

4.1.3 Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh singkil adalah 2.185,00 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh singkil sebanyak 129.963 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 60 jiwa/km². Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah

Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.3
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,375,000.00	4,567.00	7,065.00	115,933.00
2	2014	1,426,000.00	3,778.00	12,862.00	371,351.00
3	2015	1,479,000.00	4,253.70	14,164.08	416,020.39
4	2016	1,541,000.00	6,430.00	21,693.15	611,431.33
5	2017	1,602,000.00	6,919.31	18,720.74	337,270.36

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Singkil biasanya berasal dari pariwisata, kelautan, kehutanan dan lain-lain.

4.1.4 Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh selatan adalah 3.841,60 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh selatan sebanyak 230.254 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 60 jiwa/km². Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai

dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Selatan periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.4
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Selatan Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	3,281,000.00	5,060.00	21,512.00	278,249.00
2	2014	3,429,000.00	6,524.00	7,581.00	224,391.00
3	2015	3,575,000.00	10,666.65	3,470.58	545,009.14
4	2016	3,740,000.00	7,432.42	5,360.23	640,464.87
5	2017	3,887,000.00	14,160.15	9,327.68	625,597.67

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Selatan periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Selatan biasanya berasal dari kelautan, kehutanan dan lain-lain.

4.1.5 Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh tenggara

adalah 4.231,43 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh tenggara sebanyak 221.684 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 52 jiwa/km². Ibu kotanya adalah Kutacane, kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Tenggara periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.5
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	2,704,000.00	4,332.00	15,045.00	77,163.00
2	2014	2,808,000.00	5,688.00	35,330.00	193,730.00
3	2015	2,921,000.00	6,770.68	31,037.58	686,276.39
4	2016	3,052,000.00	7,055.00	33,078.49	716,470.11
5	2017	3,199,000.00	8,173.57	881.39	692,268.94

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Tenggara periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Tenggara biasanya berasal dari perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan komoditi andalannya yaitu penghasil buah kakao (coklat) di Provinsi Aceh.

4.1.6 Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh timur adalah 6.286,01 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh timur sebanyak 422.261 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 67 jiwa/km², Ibu kotanya adalah Idi Rayeuk (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Timur periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.6
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Timur Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	7,761,000.00	4,371.00	8,368.00	137,283.00
2	2014	7,721,000.00	7,129.00	21,145.00	697,335.00
3	2015	7,260,000.00	8,031.47	30,101.83	550,661.20
4	2016	7,186,000.00	6,639.50	27,219.00	771,849.54
5	2017	7,482,000.00	10,457.22	17,846.42	679,703.05

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Timur periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Timur biasanya berasal dari pertanian, kehutanan,minyak bumi dan gas, industri makanan seperti pisang sale, kelapa dan lain-lain.

4.1.7 Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh tengah adalah 4.318,39 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh tengah sebanyak 208.407 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 48 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.7
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tengah Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	4,584,000.00	5,929.00	7,315.00	128,030.00
2	2014	4,770,000.00	6,685.00	9,999.00	251,948.00
3	2015	4,972,000.00	9,838.06	7,698.23	644,615.61
4	2016	5,200,000.00	9,564.89	12,083.03	474,281.63
5	2017	5,412,000.00	11,022.31	5,597.84	646,868.32

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Tengah biasanya berasal dari pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain.

4.1.8 Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh barat adalah 2.927,95 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh barat sebanyak 189.119 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/km², ibu kotanya adalah Meulaboh (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.8
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Barat Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	4,774,000.00	11,494.00	19,242.00	123,324.00
2	2014	4,934,000.00	11,548.00	67,004.00	471,842.00
3	2015	5,160,000.00	15,185.10	13,529.35	524,409.40
4	2016	5,311,000.00	14,643.30	10,410.90	556,901.72
5	2017	6,009,000.00	28,317.44	5,233.37	611,029.07

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Barat biasanya berasal dari kelautan, kehutanan, pertanian dan lain-lain.

4.1.9 Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten aceh barat adalah 3.086,95 km², jumlah penduduk pada kabupaten aceh barat sebanyak 437.740 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/km². Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh utara (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Pidie periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.9
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Pidie Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	6,047,000.00	11,614.00	11,589.00	313,151.00
2	2014	6,291,000.00	13,225.00	13,212.00	208,329.00
3	2015	6,594,000.00	15,071.50	16,638.68	636,883.10
4	2016	6,852,000.00	14,803.97	26,056.29	824,417.51
5	2017	7,153,000.00	18,184.06	27,439.42	697,447.10

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Pidie periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada

Kabupaten Pidie biasanya berasal dari perkebunan, pertanian, peternakan, industri pangan, pariwisata dan lain-lain.

4.1.10 Kabupaten Bireun

Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Bireun adalah 1.901,20 km², jumlah penduduk pada kabupaten Bireun sebanyak 432.870 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 228 jiwa/km². Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Bireun periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.10
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja
Langsung Kabupaten Bireun Periode Tahun 2013 s/d 2017
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	8,000,000.00	9,404.00	12,580.00	159,420.00
2	2014	8,171,000.00	11,983.00	8,697.00	259,167.00
3	2015	8,482,000.00	17,648.41	14,862.07	561,131.91
4	2016	8,828,000.00	16,691.77	6,592.37	635,365.56
5	2017	9,189,000.00	19,705.52	10,899.30	650,385.25

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten

Bireun periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Bireun biasanya berasal dari peternakan, perkebunan, kuliner, kelautan dan lain-lain

4.1.11 Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Utara adalah 3.236,86 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Utara sebanyak 902,554 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 378 jiwa/km². Ibukota kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.11
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2013 s/d 2017
(Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	17,837,000.00	12,997.00	52,051.00	303,807.00
2	2014	17,196,000.00	17,957.00	120,224.00	820,588.00
3	2015	15,185,000.00	19,883.02	51,154.24	753,425.42
4	2016	15,194,000.00	23,934.47	5,789.24	707,146.58
5	2017	15,604,000.00	26,143.33	42,016.08	693,533.58

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Utara biasanya berasal dari pertambangan dan pergalian, minyak bumi dan gas, pertanian, industri dan lain-lain.

4.1.12 Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.490,60 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 148.687 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa/km². Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 dengan Ibu Kota Blangpidie. Kabupaten yang sering disingkat dengan singkatan "ABDYA" ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Barat Daya periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.12
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja
Langsung Kabupaten Aceh Barat Daya Periode Tahun 2013
s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	2,402,000.00	3,143.00	3,668.00	246,805.00
2	2014	2,428,000.00	3,878.00	1,939.00	141,462.00
3	2015	2,509,000.00	4,556.36	3,391.59	419,891.32
4	2016	2,624,000.00	5,000.00	4,840.00	608,289.69
5	2017	2,741,000.00	7,703.60	2,433.71	377,313.37

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Barat Daya periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Barat Daya biasanya berasal dari perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, industri, pertambangan dan lain-lain.

4.1.13 Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Luas wilayah kabupaten Gayo Lues adalah 5.719,58 km², jumlah penduduk pada kabupaten Gayo Lues sebanyak 95.370 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 17 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah

jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Gayo Lues periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.13
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Gayo Lues Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,591,000.00	2,974.00	12,033.00	131,343.00
2	2014	1,652,000.00	3,776.00	15,505.00	228,352.00
3	2015	1,717,000.00	4,504.08	17,572.09	618,751.11
4	2016	1,786,000.00	3,996.06	18,249.66	738,776.56
5	2017	1,876,000.00	5,433.79	22,296.47	492,274.00

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Gayo Lues periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Gayo Lues biasanya berasal dari pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain.

4.1.14 Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Tamiang adalah 1.956,72 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 287.733 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 147 jiwa/km². Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatra Utara (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Kabupaten ini

berada di jalur timur Sumatra yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Tamiang periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.14
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	4,886,000.00	9,921.00	20,085.00	83,186.00
2	2014	5,003,000.00	8,358.00	71,737.00	228,528.00
3	2015	5,135,000.00	8,369.01	7,424.80	536,553.42
4	2016	5,276,000.00	11,005.33	72,818.13	701,984.06
5	2017	5,487,000.00	11,230.14	8,423.36	524,796.71

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Tamiang periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Tamiang biasanya berasal dari minyak bumi dan gas, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain.

4.1.15 Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Nagan Raya

adalah 3.363,72 km², jumlah penduduk pada kabupaten Nagan Raya sebanyak 167.672 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 50 jiwa/km². Ibukotanya Suka Makmue, yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Banda Aceh (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.15
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	5,033,000.00	5,866.00	1,574.00	153,868.00
2	2014	5,205,000.00	11,012.00	10,947.00	566,652.00
3	2015	5,422,000.00	13,960.86	3,278.90	602,346.77
4	2016	5,642,000.00	22,772.50	7,100.00	720,337.81
5	2017	5,868,000.00	19,480.00	1,801.49	578,653.96

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Nagan Raya biasanya berasal dari kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

4.1.16 Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Aceh Jaya

adalah 3.812,99 km², jumlah penduduk pada kabupaten Aceh Jaya sebanyak 86.058 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 20 jiwa/km². Kabupaten Aceh Jaya dibentuk tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Aceh Jaya periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.16
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Aceh Jaya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,591,000.00	3,237.00	3,736.00	118,539.00
2	2014	1,649,000.00	8,439.00	7,746.00	202,075.00
3	2015	1,710,000.00	3,592.73	10,790.74	510,522.06
4	2016	1,778,000.00	4,471.22	16,249.49	556,871.05
5	2017	1,854,000.00	7,046.24	16,827.46	455,230.30

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Aceh Jaya periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Aceh Jaya biasanya berasal dari pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain.

4.1.17 Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran

Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.454,09 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa, jumlah penduduk pada kabupaten Bener Meriah sebanyak 154.509 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 106 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Bener Meriah periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.17
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Bener Meriah Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	2,805,000.00	1,883.00	8,318.00	116,005.00
2	2014	2,929,000.00	2,621.00	7,534.00	235,990.00
3	2015	3,071,000.00	3,263.43	5,198.50	435,091.17
4	2016	3,208,000.00	2,668.45	6,268.55	407,379.61
5	2017	3,338,000.00	5,537.58	4,725.74	474,178.86

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Bener Meriah periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Bener Meriah biasanya berasal dari pertanian, perkebunan dan lain-lain.

4.1.18 Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Pidie Jaya adalah 1.073,60 km², jumlah penduduk pada kabupaten Pidie Jaya sebanyak 157.588 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 142 jiwa/km². Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kabupaten Pidie Jaya periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.18
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten Pidie Jaya Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	2,006,000.00	3,754.00	6,919.00	102,100.00
2	2014	2,079,000.00	5,292.00	20,075.00	186,256.00
3	2015	2,179,000.00	6,011.69	21,259.63	424,742.91
4	2016	2,260,000.00	5,340.00	27,260.44	523,720.40
5	2017	2,391,000.00	7,540.98	20,557.20	459,558.67

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kabupaten Pidie Jaya periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kabupaten Pidie Jaya biasanya berasal dari peternakan, pertanian dan lain-lain.

4.1.19 Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Banda Aceh adalah 61,36 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Banda Aceh sebanyak 238.814 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 3.892 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018).. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kota Banda Aceh periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.19
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Banda Aceh Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	11,597,000.00	46,726.00	17,893.00	123,374.00
2	2014	12,119,000.00	51,801.00	17,513.00	207,564.00
3	2015	12,725,000.00	55,812.36	19,494.63	533,158.91
4	2016	13,529,000.00	53,085.00	26,592.98	602,708.54
5	2017	13,940,000.00	70,931.53	22,577.27	563,302.43

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kota Banda

Aceh periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kota Banda Aceh biasanya berasal dari administrasi pemerintah sebagai ibu kota Provinsi Aceh, industri, pariwisata, kuliner dan lain-lain.

4.1.20 Kota Sabang

Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Sabang adalah 153,00 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Sabang sebanyak 40.040 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 262 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kota Sabang periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.20
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Sabang Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	841,000.00	2,886.00	4,775.00	62,345.00
2	2014	875,000.00	4,458.00	10,045.00	100,018.00
3	2015	913,000.00	5,168.15	12,045.88	279,435.34
4	2016	957,000.00	3,494.90	11,752.68	472,499.62
5	2017	1,015,000.00	5,771.45	14,319.93	270,909.01

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kota Sabang periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kota

Sabang biasanya berasal dari pariwisata, kuliner, kelautan dan perikanan.

4.1.21 Kota Langsa

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Langsa adalah 262,41 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Langsa sebanyak 182.424 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 695 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kota Langsa periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.21
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Langsa Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	2,982,000.00	6,109.00	5,206.00	239,083.00
2	2014	3,108,000.00	9,400.00	12,800.00	149,334.00
3	2015	3,245,000.00	10,090.87	4,349.95	417,409.56
4	2016	3,391,000.00	9,615.00	5,624.03	400,936.59
5	2017	3,543,000.00	13,293.76	4,501.49	546,233.24

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kota Langsa periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kota Langsa biasanya berasal dari pariwisata, administrasi pemerintah dan lain-lain.

4.1.22 Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Lhokseumawe adalah 181,06 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Lhokseumawe sebanyak 190.624 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.502 jiwa/km² (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kota Lhokseumawe periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.22
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	8,878,000.00	16,132.00	6,795.00	119,231.00
2	2014	8,222,000.00	20,547.00	12,617.00	320,839.00
3	2015	6,550,000.00	21,368.64	3,593.50	336,224.45
4	2016	6,460,000.00	27,497.95	4,919.80	679,059.94
5	2017	6,953,000.00	27,839.76	4,050.48	323,259.02

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kota Lhokseumawe periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian

pada Kota Lhokseumawe biasanya berasal dari industri, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

4.1.23 Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kota Subulussalam adalah 1.391,00 km², jumlah penduduk pada kabupaten Kota Subulussalam sebanyak 81.187 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 58 jiwa/km². Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh Dalam Angka, 2018). Berikut adalah jumlah PDRB (ADHK) pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung di Kota Subulussalam periode tahun 2013 – 2017:

Tabel 4.23
PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2013 s/d 2017 (Juta Rupiah)

No	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	2013	1,034,000.00	2,631.00	2,893.00	67,918.00
2	2014	1,086,000.00	3,787.00	18,450.00	152,858.00
3	2015	1,134,000.00	4,235.76	1,608.64	315,666.22
4	2016	1,192,000.00	6,180.00	4,162.60	575,908.05
5	2017	1,253,000.00	5,674.97	2,603.08	389,394.87

Sumber : DJP dan Kemenkeu Indonesia dan BPS Provinsi Aceh diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung dari Kota

Subulussalam periode tahun 2013 s/d 2017. Sumber perekonomian pada Kota Subulussalam biasanya berasal dari perkebunan, kehutanan, pertanian dan lain-lain.

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga macam pendekatan estimasi data panel yaitu, (a) pendekatan kuadrat terkecil *Common Effect model* (CEM); (b) pendekatan efek tetap *Fixed Effect Model* (FEM); (c) pendekatan efek acak *Random Effect Model* (REM). Dimana untuk memilih metode terbaik dalam data panel dilakukan uji *Goodness of Fit* dengan menggunakan *Chow test* dan *Hausman Test*.

4.2.1 Hasil *Chow Test*

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji F Restricted dengan membandingkan nilai cross-section F. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas cross-section $F > \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1 .
- b) Jika nilai probabilitas cross-section $F < \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0 .

Hasil uji chow dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.24
Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	329.698826	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	507.469833	22	0.0000

Sumber: Data diolah (2019)

Dari hasil *Chow test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.2 Hasil Hausman Test

Hausman test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Maka digunakan uji dengan nilai cross-section random. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effects Model*

H_1 : *Fixed Effects Model*

Pengujian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas cross-section random $> \alpha$ (0,05) maka terima H_0 tolak H_1 .

- b) Jika nilai probabilitas cross-section random $< \alpha$ (0,05) maka terima H_1 tolak H_0 .

Hasil uji hausman dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.25
Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	100.168347	3	0.0000

Sumber : Data diolah (2019)

Dari hasil *Hausman test* pada pengolahan data panel diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section $F < 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa tolak H_0 terima H_1 . Sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3 Hasil Uji *Goodness of Fit*

Dari hasil uji *Goodness of Fit* pada estimasi regresi data panel, diperoleh model terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Fixed Effect Model* pada penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.26
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Prob.
C	26.35097	0.0000
PD	0.067911	0.0052
RD	-0.001717	0.8450
BL	0.040608	0.0003
R-squared		0.995863
Adjusted R-squared		0.994701
F-statistic		856.9818
Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Data diolah (2019)

Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$PE = 26.35097 + 0.067911PD + -0.001717RD + 0.040608BL + e.$$

Dimana,

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

BL = Belanja Langsung

Dari hasil estimasi, nilai signifikansi statistik F sebesar $0.000000 < 0.05$, maka model yang dipakai eksis. Variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung yang terdapat dalam

persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai konstanta sebesar 26.35097 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 26.35097.

4.4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa variabel pajak daerah (X_1) memiliki probabilitas sebesar 0,0052 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar 0.067911. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Maka artinya, kenaikan satu persen pajak daerah akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8% sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Variabel retribusi daerah (X_2) memiliki probabilitas sebesar 0.8450 (lebih besar dari α 0,05) dan koefisien sebesar -0.001717. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Ini juga sesuai dalam penelitian yang dilakukan Dewi & Budhi 2018 bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasan mengapa retribusi daerah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena sumber PAD yang didapatkan dari retribusi daerah masih kurang. Hal ini sesuai dengan berita yang diterbitkan oleh serambinews.com pada jum'at, 25 Oktober 2013 bahwa Pemerintah Aceh Malas Gali PAD (Bakri, 2013). Salah satu sumber PAD

terbesar adalah dikutip dari retribusi daerah, karena PAD adalah salah satu bentuk kemandirian daerah dalam bidang keuangannya sendiri, semakin mandiri suatu daerah dalam memperoleh pendapatan daerahnya maka semakin meningkatlah pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut. Jika tingkat kemandirian daerah kecil, maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu akan rendah karena sumber pendapatan daerah hanya bergantung kepada dana otonomi daerah dan bantuan pusat.

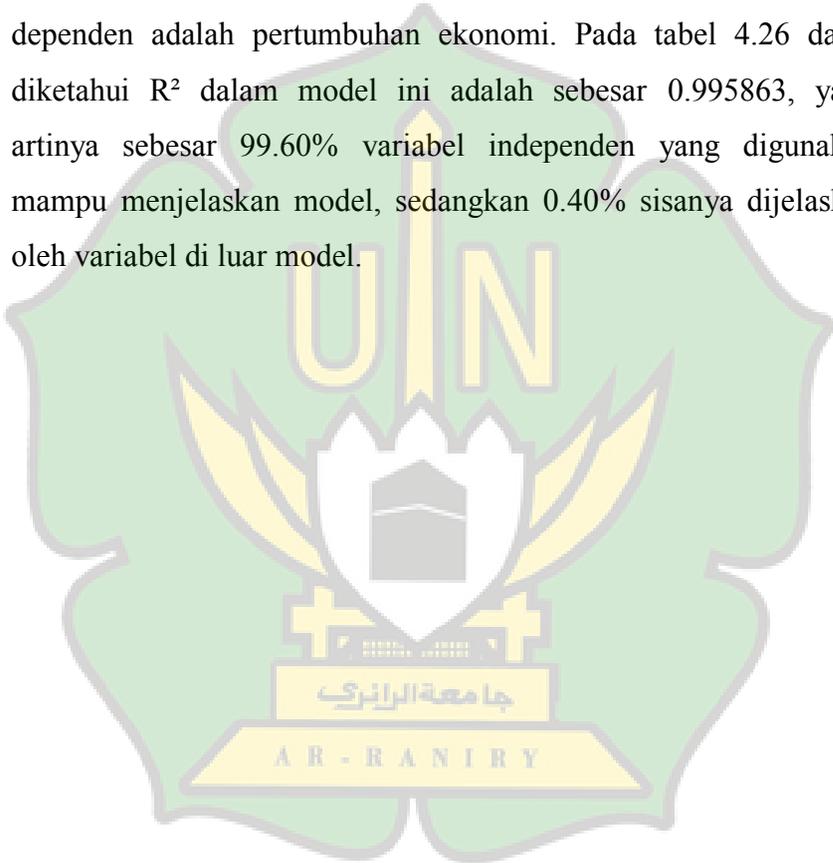
Variabel belanja langsung (X_3) memiliki probabilitas sebesar 0.0003 (lebih kecil dari α 0,05) dan koefisien sebesar 0.040608. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel belanja langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Maka artinya, kenaikan satu persen belanja langsung akan menaikkan pertumbuhan sebesar 4.1% sesuai dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

4.5 Hasil Uji signifikansi Simultan (Uji f)

Pada tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai F-statistik dalam model ini adalah sebesar 856.9818 dengan probabilitas sebesar 0.000000 (lebih kecil dari α 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

4.6 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam penelitian menjelaskan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel independen antara lain: pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung dan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tabel 4.26 dapat diketahui R^2 dalam model ini adalah sebesar 0.995863, yang artinya sebesar 99.60% variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan model, sedangkan 0.40% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh, apabila kenaikan satu persen pajak daerah akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.8%. Artinya, semakin meningkatnya variabel pajak daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Retribusi daerah tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh, hal ini terjadi karena sumber PAD yang didapatkan dari retribusi daerah masih kurang. Hasil ini dinilai bahwa pemerintah Aceh masih kurang menggali sumber PAD dari retribusi daerah.
3. Belanja langsung memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh, apabila kenaikan satu persen belanja langsung akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.1%. Artinya,

semakin meningkatnya variabel belanja langsung maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Hasil uji signifikansi simultan (Uji f) menyatakan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Langsung terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.995863, artinya 99.60% variasi variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung. Sedangkan sisanya 0.40% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penulisan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi kabupaten/kota di provinsi Aceh terus meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah terutama pada pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat lebih baik lagi.
2. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh harus lebih meningkatkan keseimbangan antara penerimaan anggaran yaitu pajak dan retribusi daerah serta pengeluaran anggaran melalui belanja langsung.
3. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh juga harus memperketat pengawasan dan tata kelola pajak daerah,

retribusi daerah dan belanja langsung agar lebih efisien dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

4. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh harus lebih meningkatkan sumber pendapatan melalui retribusi daerah, agar retribusi daerah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan di provinsi Aceh harus lebih tertib dan tepat waktu dalam membayar pajak dan retribusi agar sumber pendapatan yang didapatkan dari pajak dan retribusi dapat segera tersalurkan dalam APBD atau belanja langsung sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.
6. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pajak daerah, retribusi daerah dan belanja langsung. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat memakai variabel lain dalam melakukan penelitian yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). *Aceh Dalam Angka 2018*. Banda Aceh : Badan Pusat Statistik Aceh.
- _____. (2019). *PDRB Aceh Tahun 2013 – 2017*. Banda Aceh : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Bakri. 2013. *"Pemerintah Aceh Malas Gali PAD"*. <https://aceh.tribunnews.com/2013/10/25/pemerintah-aceh-malas-gali-pad>. (Diakses tanggal 01 Juli 2019).
- Dewi, Ju Kumala., dan Made Kembar Sri Budhi. (2018). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali, Indonesia : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Dinas Kesehatan Aceh. (2016). *Profil Kesehatan Aceh Tahun 2016*. Aceh : Dinas Kesehatan Aceh.
- Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kemenkeu Indonesia. (2019). *Realisasi APBD Tahun 2013 – 2017*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kemenkeu Indonesia.
- Hidayat, Avicienna S Hidayat dan Frederic Winston Nalle. (2017). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15, No.01. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas WisnuWardhana Malang dan Universitas Timor.

- Juwari, Setyadi, Djoko., dan Yana Ulfah. (2016). *Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan*. Jurnal Geo Ekonomi Vol. 07 No. 01. Balikpapan : Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
- Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Latuconsina, Zulfikar Mohammad Yamin. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Data Panel*. Journal of Regional and Rural Development Planning.
- Maga, Felix Farel., Tolosang, Krest. D., dan Agnes L. Ch. Lopian. (2016). *Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 1. Manado : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, N.Gregory. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mauri, Andi Pilham., Mattalatta dan Hasmin. (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Soppeng*. Jurnal Mirai Management Vol.2 No.1. Makassar : STIE Amkop.

- Mononimbar, Reggie W., Walewangko, Een N., dan Jaclien Sumual. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 17 No. 02. Manado : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mubarok, Dharma Hammam Nur. (2016). *Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 18 No.2. Samarinda : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia.
- Mukarramah, Habibatul. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Skripsi yang di publikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Paramita, Vidya. (2013). *Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*.
- Rarung, Patric. (2016). *Pengaruh PAD dan DAU Terhadap PDRB di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 3. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rochimah, Siti., Raharjo, Kharis., dan Abrar Oemar. (2013). *Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012*. Semarang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran.

- Siahaan, Marihot Pahala. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Sunarto dan Y Sunyoto. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal DharmaEkonomi Vol. 01 No. No.43. Semarang : STIE Dharmaputra Semarang.
- Widyaningsih, Atria Tiffany. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (*JEBIK*) Vol. 7, No. 3. Indonesia : Akademi Perpajakan Panca Bhakti.



Lampiran 1

Data PDRB (ADHK), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2013 – 2017 (Juta Rupiah).

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
1	Kab. Aceh Selatan	2013	3,281,000.00	5,060.00	21,512.00	278,249.00
2	Kab. Aceh Selatan	2014	3,429,000.00	6,524.00	7,581.00	224,391.00
3	Kab. Aceh Selatan	2015	3,575,000.00	10,666.65	3,470.58	545,009.14
4	Kab. Aceh Selatan	2016	3,740,000.00	7,432.42	5,360.23	640,464.87
5	Kab. Aceh Selatan	2017	3,887,000.00	14,160.15	9,327.68	625,597.67
6	Kab. Pidie	2013	6,047,000.00	11,614.00	11,589.00	313,151.00
7	Kab. Pidie	2014	6,291,000.00	13,225.00	13,212.00	208,329.00
8	Kab. Pidie	2015	6,594,000.00	15,071.50	16,638.68	636,883.10
9	Kab. Pidie	2016	6,852,000.00	14,803.97	26,056.29	824,417.51
10	Kab. Pidie	2017	7,153,000.00	18,184.06	27,439.42	697,447.10
11	Kab. Simeulue	2013	1,236,000.00	3,135.00	6,634.00	238,325.00
12	Kab. Simeulue	2014	1,289,000.00	3,167.00	1,272.00	139,159.00
13	Kab. Simeulue	2015	1,345,000.00	3,732.47	1,882.40	327,271.72
14	Kab. Simeulue	2016	1,406,000.00	2,512.00	2,039.73	435,555.51

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
15	Kab. Simeulue	2017	1,467,000.00	9,130.84	1,918.15	515,028.30
16	Kota Langsa	2013	2,982,000.00	6,109.00	5,206.00	239,083.00
17	Kota Langsa	2014	3,108,000.00	9,400.00	12,800.00	149,334.00
18	Kota Langsa	2015	3,245,000.00	10,090.87	4,349.95	417,409.56
19	Kota Langsa	2016	3,391,000.00	9,615.00	5,624.03	400,936.59
20	Kota Langsa	2017	3,543,000.00	13,293.76	4,501.49	546,233.24
21	Kab. Aceh Barat Daya	2013	2,402,000.00	3,143.00	3,668.00	246,805.00
22	Kab. Aceh Barat Daya	2014	2,428,000.00	3,878.00	1,939.00	141,462.00
23	Kab. Aceh Barat Daya	2015	2,509,000.00	4,556.36	3,391.59	419,891.32
24	Kab. Aceh Barat Daya	2016	2,624,000.00	5,000.00	4,840.00	608,289.69
25	Kab. Aceh Barat Daya	2017	2,741,000.00	7,703.60	2,433.71	377,313.37
26	Kab. Aceh Barat	2013	4,774,000.00	11,494.00	19,242.00	123,324.00
27	Kab. Aceh Barat	2014	4,934,000.00	11,548.00	67,004.00	471,842.00
28	Kab. Aceh Barat	2015	5,160,000.00	15,185.10	13,529.35	524,409.40
29	Kab. Aceh Barat	2016	5,311,000.00	14,643.30	10,410.90	556,901.72
30	Kab. Aceh Barat	2017	6,009,000.00	28,317.44	5,233.37	611,029.07
31	Kab. Aceh Besar	2013	7,863,000.00	41,104.00	11,624.00	99,919.00
32	Kab. Aceh Besar	2014	8,184,000.00	52,520.00	7,952.00	208,322.00

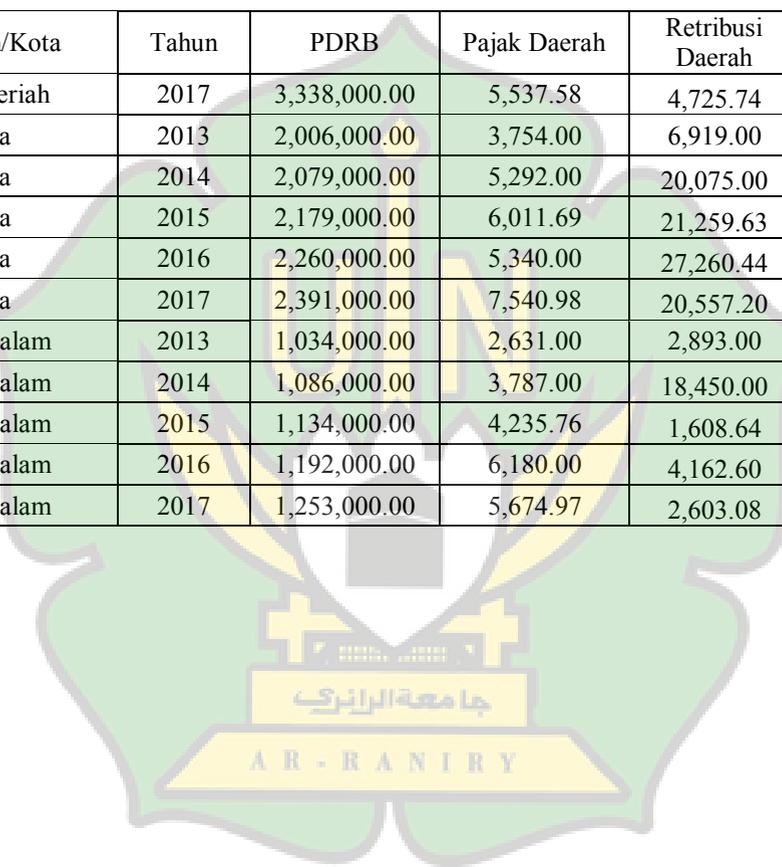
No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
33	Kab. Aceh Besar	2015	8,153,000.00	53,284.85	6,203.39	397,175.32
34	Kab. Aceh Besar	2016	8,854,000.00	43,330.00	5,587.30	725,935.84
35	Kab. Aceh Besar	2017	9,208,000.00	50,100.02	6,273.71	557,789.00
36	Kab. Aceh Singkil	2013	1,375,000.00	4,567.00	7,065.00	115,933.00
37	Kab. Aceh Singkil	2014	1,426,000.00	3,778.00	12,862.00	371,351.00
38	Kab. Aceh Singkil	2015	1,479,000.00	4,253.70	14,164.08	416,020.39
39	Kab. Aceh Singkil	2016	1,541,000.00	6,430.00	21,693.15	611,431.33
40	Kab. Aceh Singkil	2017	1,602,000.00	6,919.31	18,720.74	337,270.36
41	Kab. Aceh Tengah	2013	4,584,000.00	5,929.00	7,315.00	128,030.00
42	Kab. Aceh Tengah	2014	4,770,000.00	6,685.00	9,999.00	251,948.00
43	Kab. Aceh Tengah	2015	4,972,000.00	9,838.06	7,698.23	644,615.61
44	Kab. Aceh Tengah	2016	5,200,000.00	9,564.89	12,083.03	474,281.63
45	Kab. Aceh Tengah	2017	5,412,000.00	11,022.31	5,597.84	646,868.32
46	Kab. Aceh Tenggara	2013	2,704,000.00	4,332.00	15,045.00	77,163.00
47	Kab. Aceh Tenggara	2014	2,808,000.00	5,688.00	35,330.00	193,730.00
48	Kab. Aceh Tenggara	2015	2,921,000.00	6,770.68	31,037.58	686,276.39
49	Kab. Aceh Tenggara	2016	3,052,000.00	7,055.00	33,078.49	716,470.11
50	Kab. Aceh Tenggara	2017	3,199,000.00	8,173.57	881.39	692,268.94

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
51	Kab. Aceh Timur	2013	7,761,000.00	4,371.00	8,368.00	137,283.00
52	Kab. Aceh Timur	2014	7,721,000.00	7,129.00	21,145.00	697,335.00
53	Kab. Aceh Timur	2015	7,260,000.00	8,031.47	30,101.83	550,661.20
54	Kab. Aceh Timur	2016	7,186,000.00	6,639.50	27,219.00	771,849.54
55	Kab. Aceh Timur	2017	7,482,000.00	10,457.22	17,846.42	679,703.05
56	Kab. Aceh Utara	2013	17,837,000.00	12,997.00	52,051.00	303,807.00
57	Kab. Aceh Utara	2014	17,196,000.00	17,957.00	120,224.00	820,588.00
58	Kab. Aceh Utara	2015	15,185,000.00	19,883.02	51,154.24	753,425.42
59	Kab. Aceh Utara	2016	15,194,000.00	23,934.47	5,789.24	707,146.58
60	Kab. Aceh Utara	2017	15,604,000.00	26,143.33	42,016.08	693,533.58
61	Kab. Bireun	2013	8,000,000.00	9,404.00	12,580.00	159,420.00
62	Kab. Bireun	2014	8,171,000.00	11,983.00	8,697.00	259,167.00
63	Kab. Bireun	2015	8,482,000.00	17,648.41	14,862.07	561,131.91
64	Kab. Bireun	2016	8,828,000.00	16,691.77	6,592.37	635,365.56
65	Kab. Bireun	2017	9,189,000.00	19,705.52	10,899.30	650,385.25
66	Kota Banda Aceh	2013	11,597,000.00	46,726.00	17,893.00	123,374.00
67	Kota Banda Aceh	2014	12,119,000.00	51,801.00	17,513.00	207,564.00
68	Kota Banda Aceh	2015	12,725,000.00	55,812.36	19,494.63	533,158.91

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
69	Kota Banda Aceh	2016	13,529,000.00	53,085.00	26,592.98	602,708.54
70	Kota Banda Aceh	2017	13,940,000.00	70,931.53	22,577.27	563,302.43
71	Kota Sabang	2013	841,000.00	2,886.00	4,775.00	62,345.00
72	Kota Sabang	2014	875,000.00	4,458.00	10,045.00	100,018.00
73	Kota Sabang	2015	913,000.00	5,168.15	12,045.88	279,435.34
74	Kota Sabang	2016	957,000.00	3,494.90	11,752.68	472,499.62
75	Kota Sabang	2017	1,015,000.00	5,771.45	14,319.93	270,909.01
76	Kota Lhokseumawe	2013	8,878,000.00	16,132.00	6,795.00	119,231.00
77	Kota Lhokseumawe	2014	8,222,000.00	20,547.00	12,617.00	320,839.00
78	Kota Lhokseumawe	2015	6,550,000.00	21,368.64	3,593.50	336,224.45
79	Kota Lhokseumawe	2016	6,460,000.00	27,497.95	4,919.80	679,059.94
80	Kota Lhokseumawe	2017	6,953,000.00	27,839.76	4,050.48	323,259.02
81	Kab. Gayo Lues	2013	1,591,000.00	2,974.00	12,033.00	131,343.00
82	Kab. Gayo Lues	2014	1,652,000.00	3,776.00	15,505.00	228,352.00
83	Kab. Gayo Lues	2015	1,717,000.00	4,504.08	17,572.09	618,751.11
84	Kab. Gayo Lues	2016	1,786,000.00	3,996.06	18,249.66	738,776.56
85	Kab. Gayo Lues	2017	1,876,000.00	5,433.79	22,296.47	492,274.00
86	Kab. Aceh Jaya	2013	1,591,000.00	3,237.00	3,736.00	118,539.00

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
87	Kab. Aceh Jaya	2014	1,649,000.00	8,439.00	7,746.00	202,075.00
88	Kab. Aceh Jaya	2015	1,710,000.00	3,592.73	10,790.74	510,522.06
89	Kab. Aceh Jaya	2016	1,778,000.00	4,471.22	16,249.49	556,871.05
90	Kab. Aceh Jaya	2017	1,854,000.00	7,046.24	16,827.46	455,230.30
91	Kab. Nagan Raya	2013	5,033,000.00	5,866.00	1,574.00	153,868.00
92	Kab. Nagan Raya	2014	5,205,000.00	11,012.00	10,947.00	566,652.00
93	Kab. Nagan Raya	2015	5,422,000.00	13,960.86	3,278.90	602,346.77
94	Kab. Nagan Raya	2016	5,642,000.00	22,772.50	7,100.00	720,337.81
95	Kab. Nagan Raya	2017	5,868,000.00	19,480.00	1,801.49	578,653.96
96	Kab. Aceh Tamiang	2013	4,886,000.00	9,921.00	20,085.00	83,186.00
97	Kab. Aceh Tamiang	2014	5,003,000.00	8,358.00	71,737.00	228,528.00
98	Kab. Aceh Tamiang	2015	5,135,000.00	8,369.01	7,424.80	536,553.42
99	Kab. Aceh Tamiang	2016	5,276,000.00	11,005.33	72,818.13	701,984.06
100	Kab. Aceh Tamiang	2017	5,487,000.00	11,230.14	8,423.36	524,796.71
101	Kab. Bener Meriah	2013	2,805,000.00	1,883.00	8,318.00	116,005.00
102	Kab. Bener Meriah	2014	2,929,000.00	2,621.00	7,534.00	235,990.00
103	Kab. Bener Meriah	2015	3,071,000.00	3,263.43	5,198.50	435,091.17
104	Kab. Bener Meriah	2016	3,208,000.00	2,668.45	6,268.55	407,379.61

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Belanja Langsung
105	Kab. Bener Meriah	2017	3,338,000.00	5,537.58	4,725.74	474,178.86
106	Kab. Pidie Jaya	2013	2,006,000.00	3,754.00	6,919.00	102,100.00
107	Kab. Pidie Jaya	2014	2,079,000.00	5,292.00	20,075.00	186,256.00
108	Kab. Pidie Jaya	2015	2,179,000.00	6,011.69	21,259.63	424,742.91
109	Kab. Pidie Jaya	2016	2,260,000.00	5,340.00	27,260.44	523,720.40
110	Kab. Pidie Jaya	2017	2,391,000.00	7,540.98	20,557.20	459,558.67
111	Kota Subulussalam	2013	1,034,000.00	2,631.00	2,893.00	67,918.00
112	Kota Subulussalam	2014	1,086,000.00	3,787.00	18,450.00	152,858.00
113	Kota Subulussalam	2015	1,134,000.00	4,235.76	1,608.64	315,666.22
114	Kota Subulussalam	2016	1,192,000.00	6,180.00	4,162.60	575,908.05
115	Kota Subulussalam	2017	1,253,000.00	5,674.97	2,603.08	389,394.87



Lampiran 2

Data ln PDRB (ADHK), ln Pajak Daerah, ln Retribusi Daerah, dan ln Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2013 – 2017 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
1	Kab. Simeulue	2013	27.84290147	21.86589501	22.61547378	26.19690113
2	Kab. Simeulue	2014	27.88488784	21.8760506	20.9638563	25.658883
3	Kab. Simeulue	2015	27.92741513	22.04033627	21.35581113	26.51405662
4	Kab. Simeulue	2016	27.97176991	21.64434509	21.43608188	26.79988808
5	Kab. Simeulue	2017	28.01424062	22.93492386	21.374625	26.96748769
6	Kab. Aceh Singkil	2013	27.94947485	22.24212237	22.67841885	25.47627827
7	Kab. Aceh Singkil	2014	27.98589444	22.05246061	23.27754306	26.64041354
8	Kab. Aceh Singkil	2015	28.0223873	22.17105387	23.37397494	26.75400011
9	Kab. Aceh Singkil	2016	28.06345267	22.58424038	23.8002622	27.13906849
10	Kab. Aceh Singkil	2017	28.10227396	22.65758199	23.6528978	26.54415069
11	Kab. Aceh Selatan	2013	28.81916937	22.34463232	23.79187676	26.35178223
12	Kab. Aceh Selatan	2014	28.86328979	22.59875352	22.74891095	26.1366559
13	Kab. Aceh Selatan	2015	28.90498629	23.09038824	21.9675868	27.0240684
14	Kab. Aceh Selatan	2016	28.95010673	22.72911721	22.40227347	27.18546011

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
15	Kab. Aceh Selatan	2017	28.98865877	23.37369718	22.95625208	27.1619733
16	Kab. Aceh Tenggara	2013	28.62575327	22.18929517	23.43431155	25.0691859
17	Kab. Aceh Tenggara	2014	28.6634936	22.46162453	24.2879983	25.98973127
18	Kab. Aceh Tenggara	2015	28.70294714	22.63586719	24.15846447	27.25454629
19	Kab. Aceh Tenggara	2016	28.74681823	22.67700242	24.22214904	27.29760236
20	Kab. Aceh Tenggara	2017	28.79385938	22.82417159	20.5970118	27.26324036
21	Kab. Aceh Timur	2013	29.68013231	22.19825765	22.84768074	25.64531033
22	Kab. Aceh Timur	2014	29.67496501	22.68743681	23.77466931	27.27053176
23	Kab. Aceh Timur	2015	29.61340094	22.80663383	24.12785175	27.03438558
24	Kab. Aceh Timur	2016	29.6031558	22.6163025	24.0271811	27.37205547
25	Kab. Aceh Timur	2017	29.64352125	23.07055816	23.605069	27.24492186
26	Kab. Aceh Tengah	2013	29.1535931	22.5031214	22.71319287	25.57553045
27	Kab. Aceh Tengah	2014	29.19336742	22.62313205	23.02575092	26.25248855
28	Kab. Aceh Tengah	2015	29.23484329	23.00952431	22.76425653	27.19192003
29	Kab. Aceh Tengah	2016	29.27967974	22.98136536	23.21506787	26.88506713
30	Kab. Aceh Tengah	2017	29.31963983	23.12318691	22.44564599	27.19540858
31	Kab. Aceh Barat	2013	29.19420564	23.165091	23.68036123	25.53808088
32	Kab. Aceh Barat	2014	29.22717113	23.1697781	24.92801816	26.87991002

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
33	Kab. Aceh Barat	2015	29.2719577	23.44358035	23.32812719	26.98553852
34	Kab. Aceh Barat	2016	29.30080126	23.40724873	23.06611913	27.04565461
35	Kab. Aceh Barat	2017	29.42427946	24.06674363	22.37832128	27.13841037
36	Kab. Aceh Besar	2013	29.69318933	24.43937128	23.17633776	25.32762569
37	Kab. Aceh Besar	2014	29.73320214	24.68445989	22.79668931	26.0623508
38	Kab. Aceh Besar	2015	29.72940707	24.69891794	22.548362	26.70764364
39	Kab. Aceh Besar	2016	29.81189045	24.49211107	22.443762	27.31072747
40	Kab. Aceh Besar	2017	29.85109379	24.63728728	22.55963293	27.04724659
41	Kab. Pidie	2013	29.4305834	23.1754771	23.17332221	26.46995134
42	Kab. Pidie	2014	29.47014116	23.30537481	23.30439134	26.0623844
43	Kab. Pidie	2015	29.51718126	23.43607119	23.53499585	27.17985196
44	Kab. Pidie	2016	29.5555617	23.41816139	23.9835252	27.43794293
45	Kab. Pidie	2017	29.59855297	23.62381118	24.03524643	27.2706925
46	Kab. Bireun	2013	29.71046266	22.96440097	23.25537409	25.79480807
47	Kab. Bireun	2014	29.73161242	23.20675482	22.88624398	26.28073848
48	Kab. Bireun	2015	29.76896739	23.59391138	23.42207791	27.05322185
49	Kab. Bireun	2016	29.8089496	23.53818155	22.60917876	27.17746635
50	Kab. Bireun	2017	29.84902823	23.7041646	23.11196405	27.20083072

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
51	Kab. Aceh Utara	2013	30.51229607	23.2879844	24.67548984	26.43965847
52	Kab. Aceh Utara	2014	30.47569791	23.61124585	25.51262251	27.43328699
53	Kab. Aceh Utara	2015	30.35132921	23.71313192	24.65811121	27.34789588
54	Kab. Aceh Utara	2016	30.35192173	23.89858534	22.47926714	27.28450381
55	Kab. Aceh Utara	2017	30.37854841	23.98685991	24.46131813	27.26506549
56	Kab. Aceh Barat Daya	2013	28.50732284	21.86844359	22.02291239	26.23186439
57	Kab. Aceh Barat Daya	2014	28.51808899	22.07858539	21.38543821	25.67529697
58	Kab. Aceh Barat Daya	2015	28.55090538	22.23978956	21.94456572	26.76326176
59	Kab. Aceh Barat Daya	2016	28.59572099	22.33270375	22.30018056	27.13391707
60	Kab. Aceh Barat Daya	2017	28.63934393	22.76495317	21.61268453	26.65634189
61	Kab. Gayo Lues	2013	28.09538387	21.81317368	23.21091871	25.60107806
62	Kab. Gayo Lues	2014	28.13300779	22.05193109	23.46442839	26.15415414
63	Kab. Gayo Lues	2015	28.1715997	22.22824907	23.58957792	27.15096895
64	Kab. Gayo Lues	2016	28.2109996	22.10857473	23.62741204	27.32826135
65	Kab. Gayo Lues	2017	28.26016297	22.41590183	23.8276943	26.92230132
66	Kab. Aceh Tamiang	2013	29.21739509	23.01791956	23.7232391	25.1443449
67	Kab. Aceh Tamiang	2014	29.24105885	22.846485	24.99627249	26.15492458
68	Kab. Aceh Tamiang	2015	29.26710096	22.84780111	22.7280921	27.00843196

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
69	Kab. Aceh Tamiang	2016	29.29418935	23.12164558	25.01123079	27.27717653
70	Kab. Aceh Tamiang	2017	29.33340277	23.14186697	22.85427498	26.9862768
71	Kab. Nagan Raya	2013	29.24703734	22.49243881	21.17688599	25.75936093
72	Kab. Nagan Raya	2014	29.28064082	23.12225142	23.11633128	27.0630112
73	Kab. Nagan Raya	2015	29.32148587	23.35952355	21.91077372	27.12409914
74	Kab. Nagan Raya	2016	29.36125973	23.8488195	22.68336016	27.30298612
75	Kab. Nagan Raya	2017	29.40053498	23.69265437	21.31187729	27.08397049
76	Kab. Aceh Jaya	2013	28.09538387	21.89791281	22.04128136	25.49850786
77	Kab. Aceh Jaya	2014	28.13119016	22.85612966	22.77044242	26.03190475
78	Kab. Aceh Jaya	2015	28.16751449	22.00217939	23.10195403	26.95869968
79	Kab. Aceh Jaya	2016	28.20651025	22.220927	23.51132733	27.04559954
80	Kab. Aceh Jaya	2017	28.24836658	22.67576051	23.54627814	26.84406927
81	Kab. Bener Meriah	2013	28.66242465	21.35613209	22.84168768	25.47689913
82	Kab. Bener Meriah	2014	28.70568218	21.68682176	22.74269195	26.18705527
83	Kab. Bener Meriah	2015	28.75302436	21.90604498	22.37163613	26.79882144
84	Kab. Bener Meriah	2016	28.79666881	21.70476362	22.5588109	26.73301129
85	Kab. Bener Meriah	2017	28.83639294	22.43482425	22.27628979	26.88485042
86	Kab. Pidie Jaya	2013	28.32716381	22.04608778	22.65753709	25.34921856

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
87	Kab. Pidie Jaya	2014	28.36290812	22.38946208	23.7227411	25.95038791
88	Kab. Pidie Jaya	2015	28.40988717	22.51697198	23.78007566	26.7747499
89	Kab. Pidie Jaya	2016	28.44638593	22.39849149	24.02870256	26.9842238
90	Kab. Pidie Jaya	2017	28.5027328	22.74361806	23.74647711	26.85353245
91	Kota Banda Aceh	2013	30.08176756	24.56756659	23.60767541	25.53848623
92	Kota Banda Aceh	2014	30.12579558	24.67067529	23.5862093	26.05870556
93	Kota Banda Aceh	2015	30.17458968	24.74526123	23.69340491	27.00208536
94	Kota Banda Aceh	2016	30.23585665	24.69516024	24.00391309	27.12469957
95	Kota Banda Aceh	2017	30.26578352	24.98498094	23.84020947	27.05708249
96	Kota Sabang	2013	27.4578575	21.7831373	22.28665981	24.85594931
97	Kota Sabang	2014	27.49748972	22.21796607	23.03034084	25.32861601
98	Kota Sabang	2015	27.54000172	22.36577978	23.21198817	26.35603676
99	Kota Sabang	2016	27.58706923	21.97456948	23.18734682	26.88130278
100	Kota Sabang	2017	27.64590973	22.47618952	23.38491832	26.32504884
101	Kota Langsa	2013	28.72361533	22.53302893	22.37307764	26.20007661
102	Kota Langsa	2014	28.76500055	22.96397553	23.27271101	25.72945124
103	Kota Langsa	2015	28.80813647	23.03489642	22.19342918	26.75733374
104	Kota Langsa	2016	28.85214598	22.98659022	22.45031374	26.71706913

No	Kabupaten/Kota	Tahun	ln PDRB	ln PAJAK DAERAH	ln RETRIBUSI DAERAH	ln BELANJA LANGSUNG
105	Kota Langsa	2017	28.89599494	23.3105607	22.22767428	27.0263119
106	Kota Lhokseumawe	2013	29.81459742	23.50407071	22.63945288	25.50432862
107	Kota Lhokseumawe	2014	29.7378346	23.74598078	23.25831095	26.49420528
108	Kota Lhokseumawe	2015	29.51048617	23.78519014	22.00239219	26.54104477
109	Kota Lhokseumawe	2016	29.49665043	24.03737729	22.31653372	27.24397524
110	Kota Lhokseumawe	2017	29.57019434	24.04973121	22.1221021	26.50171977
111	Kota Subulussalam	2013	27.66445589	21.69062984	21.78555986	24.94156693
112	Kota Subulussalam	2014	27.71352234	22.05483999	23.63833021	25.75277522
113	Kota Subulussalam	2015	27.75677232	22.16682779	21.19865241	26.47795122
114	Kota Subulussalam	2016	27.80665368	22.54458411	22.14940572	27.07921384
115	Kota Subulussalam	2017	27.85656179	22.4593315	21.67996282	26.68785977



Lampiran 3

Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 12:55

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.501001	1.985500	4.281542	0.0000
X1	0.711184	0.056154	12.66496	0.0000
X2	0.136640	0.047597	2.870767	0.0049
X3	0.037945	0.069351	0.547141	0.5854
R-squared	0.658709	Mean dependent var		28.94654
Adjusted R-squared	0.649485	S.D. dependent var		0.778972
S.E. of regression	0.461185	Akaike info criterion		1.324127
Sum squared resid	23.60874	Schwarz criterion		1.419603
Log likelihood	-72.13731	Hannan-Quinn criter.		1.362880
F-statistic	71.41196	Durbin-Watson stat		0.370780
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانيرى

AR - RANIRY

Lampiran 4

Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 12:58

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.35097	0.490414	53.73210	0.0000
X1	0.067911	0.023681	2.867746	0.0052
X2	-0.001717	0.008757	-0.196056	0.8450
X3	0.040608	0.010897	3.726467	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995863	Mean dependent var	28.94654
Adjusted R-squared	0.994701	S.D. dependent var	0.778972
S.E. of regression	0.056705	Akaike info criterion	-2.706045
Sum squared resid	0.286171	Schwarz criterion	-2.085452
Log likelihood	181.5976	Hannan-Quinn criter.	-2.454150
F-statistic	856.9818	Durbin-Watson stat	0.970615
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

Hasil Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/30/19 Time: 13:03

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.33819	0.481401	52.63426	0.0000
X1	0.120983	0.022825	5.300353	0.0000
X2	0.004371	0.008707	0.502045	0.6166
X3	0.027692	0.010762	2.573176	0.0114
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.309456	0.9675
Idiosyncratic random			0.056705	0.0325
Weighted Statistics				
R-squared	0.275250	Mean dependent var		2.364165
Adjusted R-squared	0.255662	S.D. dependent var		0.090008
S.E. of regression	0.077654	Sum squared resid		0.669346
F-statistic	14.05206	Durbin-Watson stat		0.504862
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.201786	Mean dependent var		28.94654
Sum squared resid	55.21634	Durbin-Watson stat		0.006120

Lampiran 6

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	329.698826	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	507.469833	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 13:00

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.501001	1.985500	4.281542	0.0000
X1	0.711184	0.056154	12.66496	0.0000
X2	0.136640	0.047597	2.870767	0.0049
X3	0.037945	0.069351	0.547141	0.5854

R-squared	0.658709	Mean dependent var	28.94654
Adjusted R-squared	0.649485	S.D. dependent var	0.778972
S.E. of regression	0.461185	Akaike info criterion	1.324127
Sum squared resid	23.60874	Schwarz criterion	1.419603
Log likelihood	-72.13731	Hannan-Quinn criter.	1.362880
F-statistic	71.41196	Durbin-Watson stat	0.370780
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	100.168347	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.067911	0.120983	0.000040	0.0000
X2	-0.001717	0.004371	0.000001	0.0000
X3	0.040608	0.027692	0.000003	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/30/19 Time: 13:04

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.35097	0.490414	53.73210	0.0000
X1	0.067911	0.023681	2.867746	0.0052
X2	-0.001717	0.008757	-0.196056	0.8450
X3	0.040608	0.010897	3.726467	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995863	Mean dependent var	28.94654
Adjusted R-squared	0.994701	S.D. dependent var	0.778972
S.E. of regression	0.056705	Akaike info criterion	-2.706045
Sum squared resid	0.286171	Schwarz criterion	-2.085452

Log likelihood	181.5976	Hannan-Quinn criter.	-2.454150
F-statistic	856.9818	Durbin-Watson stat	0.970615
Prob(F-statistic)	0.000000		

